

PENGEMBANGAN PARADIGMA BARU PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN (CIVIC EDUCATION) DALAM PRAKTEK PEMBELAJARAN KURIKULUM BERBASIS KOMPETENSI*

Cholisin **

A. PENDAHULUAN

Paradigma dalam hal ini dimaksudkan merupakan kesepakatan dari suatu komunitas tentang hal-hal yang bersifat mendasar seperti: materi pokok keilmuan, sudut pandang atau orientasi, visi dan misi. Komunitas dalam hal ini adalah komunitas Pendidikan Kewarganegaraan (PKn). PKn (*Civic Education*) merupakan mata pelajaran yang bertugas bagaimana membentuk warga negara yang baik (*how a good citizen*). Warga negara yang baik adalah warga negara yang sadar akan hak – kewajibannya. Dengan kesadaran akan hak – kewajibannya maka seorang warga negara diharapkan menjadi kritis, partisipatif dan bertanggung jawab.

Ukuran warga negara yang baik tentunya sangat dipengaruhi oleh ideologi nasional masing-masing negara. Bagi bangsa Indonesia ideologi Pancasila merupakan acuan dalam membina warga negara yang baik. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) sebagai PKn versi Indonesia memiliki fungsi memberdayakan warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang sejalan dengan Pancasila (istilah PPKn dalam Kurikulum 2004 tampaknya akan diganti antara “Kewarganegaraan” atau “Pendidikan Kewarganegaraan”). Pengertian paradigma kadang – kadang disederhanakan sebagai cara berpikir. Jadi paradigma baru PKn merupakan cara berpikir baru tentang PKn.

B. PERBANDINGAN ANTARA PKN PARADIGMA BARU DENGAN PARADIGMA LAMA

Paradigma baru PKn antara lain memiliki struktur organisasi keilmuan yang jelas yakni berbasis pada ilmu politik, hukum dan filsafat moral /filsafat Pancasila dan memiliki visi yang kuat *nation and character building, citizenempowerment* (pemberdayaan warga negara), yang mampu mengembangkan *civil society* (masyarakat kewargaan). Paradigma baru ini merupakan upaya untuk menggantikan paradigma lama PKn (PPKn), yang antara lain bercirikan struktur keilmuan yang tidak jelas, materi disesuaikan dengan kepentingan politik rezim (hegemoni penguasa), memiliki visi untuk memperkuat *state building* (negara otoriter birokratis; kooptasi negara) yang bermuara pada posisi warga negara sebagai kaula atau obyek yang sangat lemah ketika berhadapan dengan penguasa. Akibat dari kondisi ini, PKn semakin sulit untuk mengembangkan karakter warga negara yang demokratis, sehingga menjadi lahan subur bagi berkembangnya otoriterisme. Sebagai bahan banding antara PKn paradigma baru dengan paradigma lama dapat dilihat pada tabel berikut ini :

* Disampaikan pada **Training of Trainers (ToT) Nasional Guru Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan** yang diselenggarakan oleh Direktorat Pendidikan Lanjutan Pertama (PLP) Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Asrama Haji Surabaya tanggal 3 – 17 Mei 2005 (Tahap I) dan tanggal 6 – 20 Mei (Tahap II).

** Staf Pengajar Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta.

Tabel 1. Perbandingan PKn Paradigma Lama dengan Paradigma Baru

DIMENSI	PARADIGMA LAMA	PARADIGMA BARU
Visi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penekanan pada membangun negara (<i>state building</i>). 2. Mendukung penguatan korporatis negara. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penekanan pada <i>nation and character building</i>. 2. Pemberdayaan warga negara (<i>citizen empowerment</i>). 3. Penguatan berkembangnya masyarakat kewargaan (<i>civil society</i>).
Misi	<p>Good Citizen :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Patuh kepada rezim. 2. Pendukung status- quo rezim. 	<p>Good Citizen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Aktif berpartisipasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 2. Berbudaya politik kewarganegaraan (<i>civic culture</i>). 3. Berkemampuan berpikir kritis dan kreatif.
Substansi Materi	Nilai moral P4 sebagai tafsiran tunggal rezim.	Demokrasi politik, demokrasi ekonomi dan demokrasi sosial yang dikembangkan terutama dari disiplin ilmu politik, hukum dan filsafat moral/filsafat Pancasila.
Strategi Pembelajaran	Indoktrinasi - hegemoni	Dialog – kritis.
Performance	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lemah/tidak jelas akar keilmuannya (<i>body of knowledge</i>). 2. Intervensi rezim untuk menitipkan kepentingannya sangat kuat. 3. Rentan terhadap perubahan rezim atau mengikuti selera kepentingan rezim. 4. Fokus sebagai pendidikan kewarganegaraan/pendidikan politik tidak tampak, yang tampak adalah sebagai indoktrinasi politik rezim. 5. Kredibilitas akademik dan fungsinya bagi anak didik/masyarakat sangat rendah, karena lemahnya akar keilmuan serta tidak relevannya dengan kebutuhan masyarakat demokratis. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kuat/jelas akar keilmuannya (<i>body of knowledge</i>). 2. Terbebas (independen) dari intervensi rezim 3. Memiliki otonomi keilmuan dan eksistensi yang kuat sehingga mampu mempertahankan jati dirinya sebagai pendidikan kewarganegaraan terhadap perubahan rezim. 4. Fokus sebagai pendidikan kewarganegaraan (pendidikan demokrasi, pendidikan hukum dan pendidikan moral) tampak jelas dan kuat. 5. Kredibilitas akademik dan fungsinya akan menguat karena disamping akar keilmuannya yang jelas, juga akan diraskan sebagai sesuatu yang fungsional bagi masyarakat yang sedangkan mengembangkan demokrasi dan demokratisasi.

PKn paradigma baru ini sering dikenal sebagai PKn yang bermutu. Dikatakan PKn yang bermutu karena memiliki pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*), yang berbasis pada keilmuan yang jelas dan relevan bagi masyarakat demokratis, memiliki

ketrampilan kewarganegaraan (*civic skills*), karakter kewarganegaraan (*civic dispositions*) yang mampu untuk mengembangkan pembangunan karakter bangsa, pemberdayaan warga negara dan masyarakat kewargaan. PKn yang bermutu inilah merupakan jati diri PKn. PKn yang bermutu juga sesungguhnya telah mengandung di dalamnya pemenuhan kebutuhan tuntutan dalam KBK (Kurikulum Berbasis Kompetensi) atau Kurikulum 2004.

C. KOMPONEN PKn PARADIGMA BARU

Selama ini seperti dinyatakan oleh Muchtar Buchori (Kompas, 28 Februari 2003) sekolah hanyalah memberikan kemampuan untuk menghafal, dan bukan untuk berpikir secara kreatif. Hasilnya pendidikan kita tidak punya makna. Untuk itu sekolah harus memenuhi tiga aspek, yaitu pengetahuan, skill, dan membentuk karakter. Aspek pengetahuan yang dikembangkan seharusnya bisa menopang kebutuhan skill yang terus berubah. Pentingnya materi yang dikuasai anak didik harus bisa mengikuti perkembangan kehidupan, kapan dan dimanapun, juga ditekankan oleh Winarno Surahmad (Kompas, 24 April 2003).

Sesungguhnya secara konseptual dan teoritik *Civic Education* (PKn) telah lama jauh sebelum itu mengharuskan perlunya ketiga komponen pokok tersebut, dikembangkan dalam PKn yang bermutu. Hal ini seperti yang diajukan oleh *Center for Civic Education* pada tahun 1994 dalam *National Standards for Civics and Government*. Ketiga komponen pokok tersebut, yaitu *civic knowledge, civic skills, dan civic dispositions* (Branson, dkk., 1999 : 8 – 25).

Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) Kewarganegaraan yang akan diberlakukan pada tahun 2004 tampak telah mengarah pada ketiga komponen PKn yang bermutu. Hal itu bisa dicermati pada fungsi dan tujuan mata pelajaran Kewarganegaraan sebagai versi *new civic education* Indonesia pada era reformasi atau paradigma baru PKn.

Fungsi dan tujuan mata pelajaran kewarganegaraan untuk SD & MI, SMP & M.Ts., SMA & MA :

1. Fungsi

Mata pelajaran Kewarganegaraan berfungsi sebagai wahana untuk membentuk warga negara cerdas, terampil, dan berkarakter yang setia kepada bangsa dan negara Indonesia dengan merefleksikan dirinya dalam kebiasaan berpikir dan bertindak sesuai dengan amanat Pancasila dan UUD 1945.

2. Tujuan

Tujuan mata pelajaran Kewarganegaraan adalah untuk memberikan kompetensi - kompetensi sebagai berikut :

- a. berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan;
- b. berpartisipasi secara bermutu dan bertanggung jawab, dan bertindak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- c. berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan pada karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa – bangsa lainnya.
- d. berinteraksi dengan bangsa – bangsa lain dalam percaturan dunia secara langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (Pusat Kurikulum, 2003 : 3).

Dari fungsi dan tujuan mata pelajaran kewarganegaraan di atas tampak terdapat 3 komponen penting yang hendak dikembangkan yaitu: warga negara yang cerdas (memiliki

pengetahuan kewarganegaraan), terampil (berpikir kritis dan berpartisipasi) dan berkarakter (loyal kepada bangsa dan negara, memiliki kebiasaan berpikir dan bertindak sesuai dengan

Pancasila dan UUD 1945, dapat hidup bersama dengan bangsa – bangsa lain). Karakter kewarganegaraan merupakan sifat – sifat yang mestinya melekat pada diri setiap warga negara dalam melakukan peran hidup berbangsa dan bernegara akan terbentuk ketika telah berkembang pada dirinya pengetahuan dan ketrampilan kewarganegaraan. Dengan kata lain pengetahuan dan ketrampilan kewarganegaraan merupakan basis bagi terbentuknya karakter kewarganegaraan. Pertanyaannya apa saja yang termasuk dalam pengetahuan dan ketrampilan kewarganegaraan? Berikut ini merupakan uraian mengenai ketiga komponen tersebut.

1. Pengetahuan Kewarganegaraan

Pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*) merupakan materi substansi yang harus diketahui oleh warga negara. Pada prinsipnya pengetahuan yang harus diketahui oleh warga negara berkaitan dengan hak-kewajiban /peran sebagai warga negara dan pengetahuan yang mendasar tentang struktur dan sistem politik, pemerintahan dan sistem sosial yang ideal sebagaimana terdokumentasi dalam Pancasila dan UUD 1945, maupun yang telah menjadi konvensi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta nilai-nilai universal dalam masyarakat demokratis serta cara – cara kerjasama untuk mewujudkan kemajuan bersama dan hidup berdampingan secara damai dalam masyarakat internasional.

Center for Civic Education (CEE) maupun *Standardt and Civics Framwork for the 1998 National Assesment of Education (NAEP)* mengajukan 5 pertanyaan yang jawabannya akan mengarah pada substansi pengetahuan kewarganegaraan dan standar isi (*content standard*) yang berupa ketrampilan kewarganegaraan (*civic skills*) dan karakter kewarganegaraan (*civic dispotisions*). Kelima pertanyaan tersebut yaitu :

- a. Apa kehidupan kewarganegaraan, politik, dan pemerintahan ?
- b. Apa fondasi – fondasi sistem politik ?
- c. Bagaimana pemerintahan dibentuk oleh konstitusi mengejawantahkan tujuan-tujuan, nilai – nilai dan prinsip – prinsip demokrasi ?
- d. Bagaimana hubungan negara dengan negara lain dan posisinya mengenai masalah – masalah internasional ?
- e. Apa peran warga negara dalam demokrasi ?

Tentang substansi pengetahuan kewarganegaraan ada beberapa pandangan yakni menurut CICED/*Center for Indonesian Civic Education* (2000 : 43), Menurut Pusat Pengujian Balitbang Diknas yang bekerjasama dengan Universitas Negeri Yogyakarta, yang juga dikembangkan dalam ToT (*Training of Trainers*) Guru SLTP/MTs mata pelajaran PPKn Direktorat Pendidikan Lanjutan Pertama Dikdasmen Depdiknas, dan Puskur (Pusat Kurikulum) atau KBK (Kurikulum Berbasis Kompetensi), mengajukan substansi pengetahuan kewarganegaraan seperti dalam tabel dibawah ini.

Tab 2 . Pengetahuan Kewarganegaraan

CICED	PUSIJIBANG	PUSKUR/KBK
<ol style="list-style-type: none"> 1. principles of democracy 2. comprehend of state constitution 3. citizen's rights and responsibility 4. state's rule of law 5. good government 6. citizenship 7. people sovereignty 8. free and fair tribune 9. equality and equity 10. justice 11. human rights 12. civilization 13. cultural differences 14. democratic processes 15. citizenship activities 16. national identity/attributes 17. civil society 18. free market economy 19. political processes 20. separation/distribution of power 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Manusia sebagai <i>zoon politicon</i>, 2. Nilai, norma dan moral, 3. Norma-norma dalam masyarakat, 4. Bangsa dan Negara, 5. Konstitusi, 6. Lembaga-Lembaga Politik, 7. Kewarganegaraan, 8. Sistem Politik Demokrasi, 9. Negara Hukum dan Penegakkannya, 10. Hak Asasi Manusia (HAM), 11. Peran Indonesia dalam Hubungan Internasional, 12. Identitas Nasional. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persatuan Bangsa, 2. Norma, Hukum, dan Peraturan, 3. Hak Asasi Manusia (HAM), 4. Kebutuhan Hidup, 5. Kekuasaan dan Politik, 6. Masyarakat Demokratis, 7. Pancasila dan Konstitusi Negara, 8. Globalisasi.

Kemudian dari pengetahuan kewarganegaraan menurut KBK di atas, untuk SLTP/MTs dijabarkan menjadi 14 (empat belas) materi pokok yang tersebar dalam kelas VII, kelas VIII dan kelas IX seperti terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3. Sebaran Materi Pokok Kewarganegaraan SLTP/ MTs dalam Mata Pelajaran Kewarganegaraan Kurikulum 2004

Kelas VII	Kelas VIII	Kelas IX
<ol style="list-style-type: none"> 1. Partisipasi Masyarakat dalam Otonomi Daerah 2. Perundang-undangan Nasional 3. Instrumen Nasional Hak Asasi Manusia 4. Kemerdekaan Mengemukakan Pendapat 5. Proklamasi Kemerdekaan dan Konstitusi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kedaulatan Rakyat dan Sistem Politik 2. Budaya Demokrasi 3. Pancasila sebagai Ideologi Nasional 4. Konflik antar Bangsa dan Lembaga Internasional 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembelaan terhadap Negara 2. Hukum dan Peradilan Nasional 3. Instrumen Internasional Hak asasi Manusia 4. Perlindungan Hukum 5. Konstitusi Negara Republik Indonesia

Sedangkan sebaran materi pokok Kewarganegaraan untuk SMA/MA dapat dilihat pada Tabel 3 di bawah ini.

Tabel 4. Sebaran Materi Pokok Kewarganegaraan SMA/MA dalam Kurikulum 2004

Kelas X	Kelas XI	Kelas XII
1. Hakikat Bangsa dan Negara 2. Nilai, Macam-macam Norma dan Sanksinya 3. Penegakkan Hak Asasi Manusia dan Implikasinya 4. Masyarakat Politik 5. Prinsip-prinsip Demokrasi 6. Hubungan Dasar Negara dengan Konstitusi	1. Prestasi Diri 2. Keterbukaan dan Jaminan Keadilan 3. Sistem Politik 4. Hubungan Internasional 5. Sistem Hukum Internasional dan Pengadilan Internasional 6. Pancasila dan UUD NKRI Tahun 1945	1. Sistem Pemerintahan 2. Peranan Pers dalam Kehidupan Masyarakat Demokratis 3. Globalisasi

Dengan memperhatikan aspek – aspek civic knowledge seperti dikemukakan dari berbagai pandangan di atas, maka dapat dinyatakan aspek – aspek tersebut pada dasarnya merupakan pengetahuan yang berkaitan dengan peran warga negara dalam hidup berbangsa dan bernegara yang demokratis.

2. Ketrampilan Kewarganegaraan

Ketrampilan kewarganegaraan (*civic skills*), merupakan ketrampilan yang dikembangkan dari pengetahuan kewarganegaraan, agar pengetahuan yang diperoleh menjadi sesuatu yang bermakna, karena dapat dimanfaatkan dalam menghadapi masalah-masalah kehidupan berbangsa dan bernegara. *Civic skills* mencakup *intellectual skills* (ketrampilan intelektual) dan *participation skills* (ketrampilan partisipasi). Ketrampilan intelektual yang terpenting bagi terbentuknya warga negara yang berwawasan luas, efektif dan bertanggung jawab antara lain adalah ketrampilan berpikir kritis. Ketrampilan berpikir kritis meliputi mengidentifikasi, menggambarkan / mendeskripsikan, menjelaskan, menganalisis, mengevaluasi, menentukan dan mempertahankan pendapat yang berkenaan dengan masalah – masalah publik. Ketrampilan intelektual tampak ada upaya diakomodasi KBK Kewarganegaraan (2004) yang secara ksplisit dinyatakan dalam Praktek Pembelajaran Kewarganegaraan diharuskan adanya pengembangan dan penerapan cara berpikir kritis, rasional, dan kreatif untuk mendukung kompetensi dasar. Juga dapat ditemui pada indikator, meskipun belum memadai bahkan masih ada kemampuan “menyebutkan” sebagai sesuatu kemampuan yang sangat rendah dan tidak termasuk dalam kategori berpikir kritis masih digunakan.

Pentingnya ketrampilan partisipasi dalam demokrasi telah digambarkan oleh Aristoteles dalam bukunya *Politics* (340) (dalam Branson, dkk., 1999 : 4). Aristoteles menyatakan , “Jika kebebasan dan kesamaan sebagaimana menurut sebaigian pendapat orang dapat diperoleh terutama dalam demokrasi, maka kebebasan dan kesamaan itu akan dapat dicapai apabila semua orang tanpa kecuali ikut ambil bagian sepenuhnya dalam pemerintahan”. Dengan kata lain cita – cita demokrasi dapat diwujudkan dengan sesungguhnya bila setiap warga negara dapat berpartisipasi dalam pemerintahannya. Sedangkan ketrampilan partisipasi meliputi :

berinteraksi, memantau, dan mempengaruhi. Dalam KBK Kewarganegaraan (2004) tampak ketrampilan partisipasi telah disentuh, dalam rumusan kompetensi dasar dengan eksplisit “kemampuan berpartisipasi”.

Dalam indikator tentang “kemampuan berpartisipasi” sebaiknya lebih kongkrit, namun yang muncul tampak masih abstrak dan juga belum sistematis. Misalnya indikator tentang partisipasi adalah : berpartisipasi, mensimulasikan, mendemonstrasikan, dan mempraktekkan. Oleh karena itu, sebagai bahan pertimbangan untuk pengembangan ketrampilan kewarganegaraan dalam parkatek pembelajaran kewarganegaraan, bisa dengan mengacu pada rincian seperti dapat dilihat pada Tabel di bawah ini:

Tabel 5. Ketrampilan Kewarganegaraan : Komponen Ketrampilan Intelektual

UNSUR KETRAMPILAN INTELEKTUAL WARGA NEGARA	
1.	Mengidentifikasi (menandai/menunjukkan) dibedakan menjadi ketrampilan : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Membedakan; ▪ Mengkelompokkan/mengklasifikasikan ▪ Menentukan bahwa sesuatu itu asli.
2.	Menggambarkan (memberikan uraian / ilustrasi), misalnya tentang : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Proses; ▪ Lembaga; ▪ Fungsi; ▪ Alat; ▪ Tujuan; ▪ Kualitas;
3.	Menjelaskan (mengklarifikasi / menafsirkan), misalnya tentang: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sebab-sebab terjadinya suatu peristiwa; ▪ Makna dan pentingnya peristiwa atau ide; ▪ Alasan bertindak;
4.	Menganalisis , misalnya tentang kemampuan menguraikan: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Unsur – unsur atau komponen-komponen ide (gagasan), proses politik, institusi-nstitusi; ▪ Konsekuensi dari ide, proses politik, institusi – institusi; ▪ Memilah mana yang merupakan cara dengan tujuan, mana yang merupakan fakta dan pendapat; mana yang merupakan tanggungjawab pribadi dan mana yang merupakan tanggungjawab publik.
5.	Mengevaluasi pendapat/posisi : menggunakan kriteria/standar untuk membuat keputusan tentang: <ul style="list-style-type: none"> ▪ kekuatan dan kelemahan isue / pendapat; ▪ menciptakan pendapat baru.
6.	Mengambil pendapat/posisi : <ul style="list-style-type: none"> ▪ dari hasil seleksi berbagai posisi; ▪ membuat pilihan baru;
7.	Mempertahankan pendapat/posisi: <ul style="list-style-type: none"> ▪ mengemukakan argumentasi berdasarkan asumsi atas posisi yang dipertahankan /diambil / dibela; ▪ merespons posisi yang tidak disepakati.

Sumber : Diolah dari Center for Civic Education (1994). *National Standard for Civics and Government*, p. 1-5.

Sedangkan ketrampilan kewarganegaraan komponen ketrampilan partisipasi warga negara dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 6. Ketrampilan Kewarganegaraan : Komponen Ketrampilan Partisipasi

UNSUR KETRAMPILAN PARTISIPASI WARGA NEGARA
<p>1. Berinteraksi (termasuk berkomunikasi tentunya) terhadap obyek yang berkaitan dengan masalah – masalah publik, yang termasuk dalam ketrampilan ini, al.:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ bertanya, menjawab, berdiskusi dengan sopan santun; ▪ menjelaskan artikulasi kepentingan; ▪ membangun koalisi, negoisasi, kompromi ▪ mengelola konflik secara damai; ▪ mencari konsensus. <p>2. Memantau/memonitor masalah politik dan pemerintahan terutama dalam penanganan persoalan-persoalan publik ,yang termasuk ketrampilan ini al. :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Menggunakan berbagai sumber informasi seperti perpustakaan, surat kabar, TV, dll untuk mengetahui persoalan-persoalan publik; ▪ Upaya mendapatkan informasi tentang persoalan publik dari kelompok – kelompok kepentingan, pejabat pemerintah, lembaga-lembaga pemerintah. Misalnya dengan cara menghadiri berbagai pertemuan publik seperti : pertemuan organisasi siswa, komite sekolah, dewan sekolah, pertemuan desa/BPD, pertemuan wali kota, LSM, dan organisasi kemasyarakatan lainnya. <p>3. Mempengaruhi proses politik, pemerintah baik secara formal maupun informal, yang termasuk ketrampilan ini al.:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Melakukan simulasi tentang kegiatan : kampanye, pemilu, dengar pendapat di DPR/DPRD, pertemuan wali kota, lobby, peradilan; ▪ Memberikan suara dalam suatu pemilihan; ▪ Membuat petisi; ▪ Melakukan pembicaraan/memberi kesaksian di hadapan lembaga publik; ▪ Bergabung atau bekerja dalam lembaga advokasi untuk memperjuangkan tujuan bersama atau pihak lain; ▪ Meminta atau menyediakan diri untuk menduduki jabatan tertentu.

Sumber : Diolah dari Center for Civic Education (1994). *National Standard for Civics and Government*, p. 127-135.

3. Karakter Kewarganegaraan

Karakter kewarganegaraan (*civic dispositions*), merupakan sifat – sifat yang harus dimiliki setiap warga negara untuk mendukung efektivitas partisipasi politik, berfungsinya sistem politik yang sehat, berkembangnya martabat dan harga diri dan kepentingan umum. Dalam KBK Kewarganegaraan (2003) tentang karakter kewarganegaraan belum dikembangkan secara baik dan lengkap. Dikatakan demikian, karena karakter kewarganegaraan belum terumuskan pada setiap kompetensi dasar, hasil belajar maupun indikatornya. Begitu pula meskipun telah disentuh karakter publik (misalnya : mematuhi perundang – undangan nasional; mengapresiasi dinamika politik Indonesia) namun karakter publik yang kritis terhadap undang – undang maupun terhadap sistem politik maupun rejim tampak kurang diperhatikan padahal hal ini sangat penting dalam masyarakat demokratis. Supaya segala produk undang – undang sejalan dengan aspirasi dan di bawah kontrol masyarakat. Sehingga misalnya dalam praktek pembelajaran kewarganegaraan perlu dimasukkan karakter publik yang berupa “Mengembangkan fungsi demokrasi konstitusional yang sehat “.

Sedangkan untuk karakter privat dalam KBK juga nasibnya sama dengan karakter publik. Misalnya, karakter privat ini dapat dipahami dengan rumusan “membiasakan diri

mengemukakan pendapat secara benar dan bertanggung jawab”, “membiasakan diri melaksanakan budaya demokrasi di lingkungan masyarakat”. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam kondisi transisional dan sangat dinamis, dimana antara fakta dan isu; benar dan salah cenderung berkembang menjadi kabur (*absurd*) atau “dikaburkan” maka karakter Oleh karena itu ciri-ciri watak/karakter privat (pribadi) dan karakter publik (kemasyarakatan) yang utama meliputi :

1) Menjadi anggota masyarakat yang independen (mandiri).

Karakter ini merupakan kepatuhan secara suka rela terhadap peraturan yang berlaku dan bertanggungjawab atas segala konsekuensi yang timbul dari perbuatannya serta menerima kewajiban moral dan legal dalam masyarakat demokratis.

2) Memenuhi tanggungjawab personal kewarganegaraan di bidang ekonomi dan politik.

Yang termasuk karakter ini, al. :

- Mengurus diri sendiri;
- Memberi nafkah /menopang keluarga;
- Merawat , mengurus dan mendidik anak;
- Mengikuti informasi tentang isue-isue publik;
- Memberikan suara (*voting*);
- Membayar pajak;
- Menjadi saksi di pengadilan;
- Meberikan pelayanan kepada masyarakat;
- Melakukan tugas kepemimpinan sesuai dengan bakat dan kemampuan sendiri/masing-masing.

3) Menghormati harkat dan martabat kemanusiaan tiap individu.

Yang termasuk karakter ini, al. :

- mendengarkan pendapat orang lain;
- berperilaku santun (bersikap sopan);
- menghargai hak dan kepentingan sesama warganegara;
- mematuhi prinsip aturan mayoritas, namun tetap menghargai hak minoritas untuk berbeda pendapat.

4) Berpartisipasi dalam urusan-urusan kewarganegaraan secara bijaksana dan efektif.

Karakter ini menghendaki pemilikan informasi yang luas sebelum memberikan suara (*voting*) atau berpartisipasi dalam debat publik, keterlibatan dalam diskusi yang santun dan serius, dan memegang kendali kepemimpinan yang sesuai. Juga menghendaki kemampuan membuat evaluasi kapan saatnya kepentingan pribadi sebagai warga negara dikesampingkan demi kepentingan umum dan kapan seseorang karena kewajibannya atau prinsip-prinsip konstitusional untuk menolak tuntutan-tuntutan kewarganegaraan tertentu. Sifat – sifat warganegara yang dapat menunjang karakter berpartisipasi dalam urusan-urusan kewarganegaraan (publik) diantaranya:

a) **Keberadaban (*civility*)**, yang termasuk sifat ini al. :

- menghormati orang lain;
- menghormati pendapat orang lain meskipun tidak sepaham;
- mendengarkan pandangan orang lain;
- menghindari argumentasi yang bermusuhan, sewenang-wenang, emosional dan tidak masuk akal;

b) **Menghormati hak – hak orang lain**, yang termasuk sifat ini al. :

- menghormati hak orang lain bahwa mereka memiliki suara yang sama dalam pemerintahan dan sama di mata hukum;
 - menghormati hak orang lain untuk memegang dan menganjurkan gagasan yang bermacam dan bekerjasama dalam suatu asosiasi untuk memajukan pandangan-pandangan mereka.
 - c) **Menghormati hukum**, yang termasuk sifat ini al.:
 - berkemauan mematuhi hukum, bahkan ketika ia tidak menyepakatinya;
 - berkemauan melakukan tindakan dengan cara-cara damai dan legal untuk mengubah hukum yang tidak arif dan adil;
 - d) **Jujur** : berkemauan untuk memelihara dan mengekspresikan kebenaran.
 - e) **Berpikiran terbuka** : yaitu mempertimbangkan pandangan orang lain.
 - f) **Berpikir kritis** : yaitu kehendak hati untuk mempertanyakan keabsahan/kebenaran berbagai macam posisi termasuk posisi dirinya.
 - g) **Bersedia melakukan negoisasi dan berkompromi** : yaitu kesediaan untuk membuat kesepakatan dengan orang lain meskipun terdapat perbedaan yang sangat tajam/mendalam, sejauh hal itu dinilai rasional dan adanya pembenaran secara moral untuk melakukannya.
 - h) **Ulet / tidak mudah putus asa** : yaitu kemauan untuk mencoba berulang-ulang untuk meraih suatu tujuan.
 - i) **Berpikiran kewarganegaraan** : yaitu memiliki perhatian dan kepedulian terhadap urusan – urusan publik/kemasyarakatan.
 - j) **Keharuan/memiliki perasaan kasihan** : yaitu mempunyai kepedulian agar orang lain hidupnya lebih baik, khususnya terhadap mereka yang tidak beruntung.
 - k) **Patriotisme** : memiliki loyalitas terhadap nilai – nilai demokrasi konstitusional.
 - l) **Keteguhanhati**: kuat untuk tetap pada pendiriannya, ketika kata hati menuntutnya.
 - m) **Toleran terhadap ketidak pastian**: yaitu kemampuan untuk menerima ketidak pastian yang muncul, karena ketidak cukupan pengetahuan atau pemahaman tentang isu-isu yang kompleks atau tentang ketegangan antara nilai-nilai fondamental dengan prinsip-prinsip.
- 5) **Mengembangkan fungsi demokrasi konstitusional yang sehat.**
Karakter ini mengarahkan warganegara agar bekerja dengan cara-cara damai dan legal dalam rangka mengubah undang-undang yang dianggap tidak adil dan bijaksana. Yang termasuk dalam karakter ini, al. :
- Sadar informasi dan kepekaan terhadap urusan-urusan publik;
 - Melakukan penelaahan terhadap nilai-nilai dan prinsip – prinsip konstitusional;
 - Memonitor keputusan para pemimpin politik dan lembaga-lembaga publik dalam penerapan nilai-nilai dan prinsip-prinsip konstitusional dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan apabila terdapat kekurangannya.

D. PRAKTEK PEMBELAJARAN PKn DALAM KBK

KBK (Kurikulum Berbasis Kompetensi) merupakan kurikulum yang bertolak dari kompetensi, menempatkan siswa sebagai subyek serta memberikan perhatian pada proses dan hasil. Dengan kata lain siswa harus diberikan pengalaman untuk melakukan pengetahuan yang telah diterima dalam pembelajaran dan guru diberikan otonomi akademik untuk mewujudkan standar kompetensi. Apabila dibandingkan antara Kurikulum 1994 dengan KBK dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 7. Perbandingan Kurikulum 1994 dengan KBK

ASPEK	KURIKULUM 1994	KBK
Kewenangan Pengembangan	<ul style="list-style-type: none"> • Sentralistik • Top Down • Kurnas : 80 % • Kur. Lokal : 20 % 	<ul style="list-style-type: none"> • Desentralistik • Button Up • Kurnas : 20 % • Kur. Lokal : 80 %
Orientasi	Konten/Materi	Kompetensi
Kedudukan Siswa	Obyek	Subyek
Ketrampilan/Skill	<i>Academic skill</i>	<i>Life Skills : Personal skill, Thinking skill, Social skill, Academic skill, Vocational skill</i>
Pembelajaran	<ul style="list-style-type: none"> • Otoriter • Tekstual • Klasikal 	<ul style="list-style-type: none"> • Demokratis – Partisipatif • Kontekstual • Individual – Klasikal
Penilaian	Tes	Tes – Non Tes (<i>Authentic Assesment</i>)

Kompetensi meliputi standar kompetensi dan kompetensi dasar. Standar kompetensi Pendidikan Kewarganegaraan/Kewarganegaraan sbb. :

STANDAR KOMPETENSI MATA PELAJARAN KEWARGANEGARAAN

Kemampuan memahami dan menginternalisasi sistem berbangsa dan bernegara dan menerapkannya untuk:

- Mewujudkan persatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD 1945
- Membiasakan untuk mematuhi norma, menegakkan hukum, dan menjalankan peraturan
- Berpartisipasi dalam mewujudkan masyarakat dan pemerintahan yang demokratis; menjunjung tinggi, melaksanakan, dan menghargai HAM.

Sedangkan standar kompetensi mata pelajaran Kewarganegaraan SMP dan MTs, sbb. :

STANDAR KOMPETENSI MATA PELAJARAN KEWARGANEGARAAN SMP & MTs

KELAS VII

Kemampuan untuk mencari, menyerap, mengapresiasi, menyampaikan dan menggunakan bahan kajian tentang partisipasi masyarakat dalam era otonomi; peraturan perundang-undangan nasional; instrumen nasional HAM; kemerdekaan mengeluarkan pendapat; serta merekonstruksi peristiwa proklamasi kemerdekaan dan perumusan konstitusi yang pertama

KELAS VIII

Kemampuan untuk mencari, menyerap, mengapresiasi, menyampaikan, dan menggunakan bahan kajian tentang kedaulatan rakyat dan sistem politik; budaya demokrasi, keunggulan ideologi Pancasila dibandingkan dengan ideologi negara lain; konflik kepentingan antar bangsa dan lembaga internasional.

KELAS IX

Kemampuan untuk mencari, menyerap, mengapresiasi, menyampaikan, dan menggunakan bahan kajian tentang pembelaan negara; sistem hukum dan pengadilan nasional; instrumen HAM; perlindungan hukum serta konstitusi yang pernah digunakan Indonesia

Dari tabel di atas tampak pembelajaran KBK adalah demokratis – partisipatif, kontekstual dan individual – klasikal. Dewasa ini dikembangkan pembelajaran kontekstual, meskipun bagi PKn yang menekankan penggunaan inkuiri dan menjadikan masyarakat sebagai laboratoriumnya bukan merupakan sesuatu yang asing. Namun memang diakui dalam Kurikulum 1994 metoda tersebut hampir tidak pernah disentuh.

Pembelajaran kontekstual (*Contextual Teaching Learning/CTL*) merupakan konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkannya dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sehari – hari, dengan melibatkan tujuh komponen utama pembelajaran efektif, yakni : konstruktivisme (*Constructivism*), bertanya (*Questioning*), menemukan (*Inquiry*), masyarakat belajar (*Learning Community*), pemodelan (*Modeling*), dan penilaian sebenarnya (*Authentic Assesment*) (Direktorat PLP, 2003 : 5 - 20). Penjelasan masing – masing komponen CTL, sebagai berikut.

Konstruktivisme (*Constructivism*). Konstruktivisme merupakan landasan berpikir (filosofi) pendektan CTL, yaitu bahwa pengetahuan dibangun oleh manusia sedikit demi sedikit, yang hasilnya diperluas melalui konteks yang terbatas (sempit) dan tidak sekonyong – konyong. Manusia harus mengkonstruksi pengetahuan dan memberi makna melalui pengalaman nyata. Dalam pandangan konstruktivisme strategi untuk memperoleh lebih diutamakan dibandingkan seberapa banyak siswa memperoleh dan mengingat pengetahuan. Untuk itu tugas guru adalah memfasilitasi proses tersebut dengan :

- 1) menjadikan pengetahuan bermakna dan relevan bagi siswa,
- 2) memberi kesempatan siswa menemukan dan menerapkan idenya sendiri, dan
- 3) menyadarkan siswa agar menerapkan strategi mereka sendiri dalam belajar.

Menemukan (*Inquiry*). Menemukan merupakan **bagian inti** dari kegiatan pembelajaran berbasis CTL. Pengetahuan dan ketrampilan yang diperoleh siswa diharapkan bukan hasil mengingat seperangkat fakta – fakta, tetapi hasil menemukan sendiri. Langkah – langkah kegiatan inkuiri :

- 1) Merumuskan masalah;
- 2) Mengamati atau melakukan observasi untuk mendapatkan informasi pendukung;
- 3) Menganalisis dan menyajikan hasil dalam tulisan, gambar, laporan, bagan, tabel, dan karya lain;
- 4) Mengkomunikasikan atau menyajikan hasil karya pada pembaca, teman sekelas, guru, atau audien yang lain.

Bertanya (*Questioning*). Pengetahuan yang dimiliki seseorang , selalu bermula dari ‘bertanya’. Bertanya dipandang sebagai kegiatan guru untuk mendorong, membimbing, dan menilai kemampuan berpikir siswa. Bagaimana penerapannya di kelas ? Pada semua aktivitas belajar bertanya dapat diterapkan : antara siswa dengan siswa, antara guru dengan siswa, antara siswa dengan guru, anantara siswa dengan orang lain yang didatangkan di kelas, dsb.

Masyarakat belajar (*Learninmg Community*). Konsep masyarakat belajar mnenyarakan agar hasil pemebelajaran diperoleh dari kerjasama dengan orang lain. Dalam

kelas CTL guru disarankan selalu melaksanakan pembelajaran dalam kelompok – kelompok belajar. Praktek masyarakat belajar terwujud dalam :

- Pembentukan kelompok kecil;
- Pembentukan kelompok besar;
- Mendatangkan ahli ke kelas (tokoh masyarakat, politisi, polisi, hakim, petani, buruh, dsb.);
- Bekerja dengan kelas sederajat;
- Bekerja kelompok dengan kelas di atasnya;
- Bekerja dengan masyarakat.

Pemodelan (*Modeling*). Dalam pembelajaran ketrampilan atau pengetahuan, ada model yang bisa ditiru. Model itu bisa berupa cara mengoperasikan sesuatu, contoh karya tulis. Atau, guru memberikan contoh mengerjakan sesuatu. Model juga dapat didatangkan dari luar. Contoh praktek pemodelan di kelas : Guru mendatangkan seorang Kepala Desa/Lurah, Camat, Hakim, Anggota BPD/DPRD/DPD, Pengacara, Wali Kota, Bupati, Pimpinan Partai Politik, dsb., lalu siswa diminta bertanya dengan tokoh – tokoh itu.

Refleksi (*Reflection*). Refleksi adalah cara berpikir tentang apa yang baru dipelajari atau berpikir kebelakang tentang apa-apa yang sudah dilakukan. Siswa mengendapkan apa yang baru dipelajarinya sebagai struktur pengetahuan yang baru, yang merupakan pengayaan atau revisi dari pengetahuan sebelumnya. Misalnya, ketika pelajaran berakhir, siswa merenung “ Kalau begitu pemahaman saya selama ini bahwa Bupati/Gubernur dalam rangka otonomi daerah harus berasal dari putra daerah adalah salah ! Mestinya, dengan pengetahuan yang baru saya pelajari ini, bisa berasal dari daerah mana saja dari wilayah RI yang penting mampu memimpin dan memajukan daerah serta mensejahterakan rakyat “.

Praktek refleksi dalam pembelajaran, yaitu Guru pada akhir pembelajaran menyisakan waktu sejenak agar siswa melakukan refleksi. Pelaksanaan refleksi berupa :

- pernyataan langsung tentang apa – apa yang diperolehnya hari itu
- catatan atau jurnal di buku siswa
- kesan dan saran siswa mengenai pembelajaran hari itu
- diskusi
- hasil karya

Penilaian yang sebenarnya (*Authentic Assesment*). Asesment adalah proses pengumpulan data yang bisa memberikan gambaran perkembangan belajar siswa. Data yang dikumpulkan melalui penilaian (*assesment*) ditekankan untuk membantu siswa agar mampu mempelajari (*learning how to learn*), bukan ditekankan pada diperolehnya sebanyak mungkin informasi di akhir periode pembelajaran. Karena *assesment* menekankan proses pembelajaran, maka data yang dikumpulkan harus diperoleh dari kegiatan nyata yang dikerjakan siswa pada saat melakukan proses pembelajaran. Data yang diambil dari kegiatan siswa baik di dalam kelas maupun di luar kelas itulah yang disebut data autentik.

Dengan kata lain kemajuan belajar dinilai dari proses, bukan melulu hasil, dan dengan berbagai cara. Tes hanya salah satunya. **Itulah hakekat penilaian sebenarnya** (*authentic assesment*). Penilaian otentik atau juga dikenal penilaian berdasarkan perbuatan (*performance based assesment*) menilai pengetahuan dan ketrampilan /perbuatan yang diperoleh siswa. Penilai tidak hanya guru, tetapi bisa juga orang lain. Hal –hal yang bisa digunakan sebagai dasar menilai prestasi siswa, dalam PKn :

- 1) catatan kegiatan
- 2) catatan anekdot

- 3) catatan tindakan
- 4) koleksi pekerjaan
- 5) skala sikap
- 6) tugas individu
- 7) tugas kelompok atau kelas
- 8) diskusi
- 9) wawancara
- 10) catatan pengamatan atau observasi
- 11) peta perilaku
- 12) kuesioner
- 13) pengukuran sosiometrik
- 14) tes buatan guru
- 15) tes standar prestasi
- 16) portofolio
- 17) tes standar psikologis

Dengan demikian PBK dalam KBK menghendaki penerapan belajar secara kontekstual (CTL) yang merupakan suatu inovasi. Dikatakan sebagai suatu inovasi pembelajaran karena dirancang untuk membantu peserta didik memahami teori kewarganegaraan melalui pengalaman belajar praktek – empirik. Kemudian dalam rangka belajar secara kontekstual, metode yang diharapkan digunakan adalah : **kooperatif, penemuan, inkuiri, interaktif, eksploratif, berpikir kritis, dan pemecahan masalah.** Untuk SLTP/MTs ditekankan pada penggunaan pemecahan masalah.

Kemudian penilaian autentik menghendaki laporan kepada orang tua bukan hanya rapor, tetapi juga hasil karya siswa, laporan hasil praktikum, karangan siswa, dll. Salah satu aspek untuk menilai hasil akhir PBK adalah portofolio. **Portofolio** merupakan hasil belajar yang berupa rencana dan tindakan nyata yang ditayangkan oleh setiap individu atau kelompok dan dinilai secara periodik melalui kompetisi interaktif – argumentatif pada tingkat kelas, sekolah, daerah setempat, dan nasional. Peserta didik kemudian diberikan sertifikat keberhasilan dalam mengikuti kegiatan tersebut. Bagaimana mengembangkan portofolio kelas ? Portofolio dikelas dapat dikembangkan ketika informasi telah dirasakan cukup. Portofolio dikembangkan meliputi seksi penayangan dan seksi dokumentasi (Dasim Budimansyah, 2002 : 49 – 51). Portofolio seksi penayangan bertugas menyiapkan empat panel tayangan (untuk kelompok portofolio satu, dua, ketiga dan empat). Bahan yang ditayangkan bisa dalam bentuk : pernyataan tertulis, daftar sumber informasi, peta, grafik, foto, gambar, karikatur, karya seni, dsb. Sedangkan seksi dokumentasi, bertugas mendokumentasikan bahan-bahan yang bisa berupa: berita, artikel, gambar, grafik, tabel, data lengkap hasil wawancara, data hasil analisis, dsb. Dokumentasi disusun dalam empat bab. Bab pertama, berisi tentang penjelasan masalah; Bab kedua, tentang kebijakan-kebijakan alternatif untuk memecahkan masalah; Bab ketiga, tentang usulan kebijakan alternatif untuk mengatasi masalah; dan Bab keempat, berisi tentang rencana tindakan.

Kemudian selanjutnya dikembangkan dalam portofolio kelas. Kelas dibagi menjadi empat kelompok. Masing – masing kelompok ditugas untuk membuat salah satu bagian dari portofolio kelas. Setiap kelompok portofolio hendaknya memilih bahan-bahan yang dikumpulkan oleh semua tim peneliti sesuai dengan keperluannya. Berikut ini adalah tugas – tugas setiap kelompok portofolio.

1) Kelompok portofolio satu.

Kelompok ini bertugas **menjelaskan masalah**. Yakni bertanggung jawab untuk menjelaskan masalah yang menjadi kajian kelas dan menjelaskan mengapa masalah itu penting dan mengapa pemerintah harus memecahkan masalah tersebut.

2) Kelompok portofolio dua.

Kelompok ini bertugas **mengkaji kebijakan alternatif untuk mengatasi masalah**. Yakni bertanggung jawab untuk menjelaskan berbagai kebijakan alternatif untuk memecahkan masalah.

3) Kelompok portofolio tiga.

Kelompok ini bertugas **mengusulkan kebijakan publik untuk mengatasi masalah**. Yakni bertanggung jawab untuk mengusulkan dan menjustifikasi kebijakan publik yang disepakati kelas untuk memecahkan masalah.

4) Kelompok portofolio empat.

Kelompok empat ini bertugas **membuat rencana tindakan**. Yakni bertanggung jawab untuk membuat rencana tindakan yang menunjukkan bagaimana warga negara dapat **mempengaruhi** pemerintah untuk menerima kebijakan yang didukung kelas.

Apabila ketujuh komponen CTL di atas, diterapkan dalam **Praktek Belajar Kewarganegaraan**, maka dalam proses belajar Kewarganegaraan akan didapatkan indikator sebagai berikut :

- KERJASAMA
- SALING MENUNJANG
- MENYENANGKAN, TIDAK MEMBOSANKAN
- BELAJAR DENGAN GAIRAH
- PEMBELAJARAN TERINTEGRASI
- MENGGUNAKAN BERBAGAI SUMBER
- SISWA AKTIF
- SHARING DENGAN TEMAN
- SISWA KRITIS GURU KREATIF
- DINDING KELAS DAN LORONG – LORONG PENUH DENGAN HASIL KARYA SISWA: ARTIKEL, POSTER, GAMBAR, DLL.
- LAPORAN KEPADA ORANG TUA BUKAN HANYA RAPOR TETAPI JUGA HASIL KARYA SISWA.

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, bahwa PBK yang dianut dalam KBK mata pelajaran Kewarganegaraan adalah belajar secara kontekstual atau menerapkan prinsip – prinsip CTL dalam proses belajar Kewarganegaraan. Namun apabila dicermati bahwa inti CTL sendiri berupa inkuiri, maka sesungguhnya bukan hal yang baru bagi PKn/Kewarganegaraan. Sebab inkuiri merupakan metode yang memang harus dikemban atau inheren dalam PKn. Begitu pula dengan portofolio, yang sebenarnya dapat dinyatakan sebagai pengembangan inkuiri yang didokumentasikan dan dikompetisikan.

Bagaimana penerapan *civic skills* dan karakter kewarganegaraan dalam PBK ? Tentang hal ini dapat dijelaskan bahwa tuntutan dalam PKn untuk mengembangkan ketrampilan dan karakter kewarganegaraan, sesungguhnya telah terakomodasi dalam CTL maupun portofolio. Hal itu dapat ditunjukkan, misalnya ketika siswa diminta untuk menentukan posisi/sikap tentang isu kewarganegaraan hal ini termasuk dalam komponen konstruktivisme dari CTL. Kemudian misalnya, ketika siswa dituntut untuk melakukan bertanya, berdiskusi secara sopan-santun, bernegosiasi, melakukan konsensus, hal ini termasuk komponen bertanya dan masyarakat belajar dari CTL. Mendatangi atau pejabat

publik di datangkan di kelas untuk dintanya keterkaitan dengan perannya dalam masalah publik dapat dimasukan dalam komponen modeling dari CTL. Kemudian untuk portofolio, relevansinya tampak sekali pada aspek memonitoring dan mempengaruhi dari ketrampilan partisipasi kewarganegaraan.

Dengan demikian *civic skill* dan *civic dispositions* apabila diterapkan dengan baik dalam arti konsisten dalam PBK, maka dapat dipastikan akan bernuansa CTL. **Begitu pula dapat dinyatakan bahwa kecakapan hidup (*life skill*) yang hendak dikembangkan dalam KBK telah terakomodasi dalam civic skills dan civic disposition.** Life skill meliputi: kecakapan personal/pribadi (*personal skill*), kecakapan berpikir rasional (*thinking skill*), kecakapan sosial atau kecakapan interpersonal (*social skill*), kecakapan akademik (*cademic skill*), dan kecakapan vokasional (*vocational skill*) (Tim Broad Based Education, 2001 : 8-9).

Kecakapan personal meliputi : (1) pengahayatan diri sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, sebagai anggota masyarakat dan warga negara; (2) menyadari dan mensyukuri kelebihan dan kekuarangan yang dimiliki, sekaligus menjadikannya sebagai modal dalam meningkatkan dirinya sebagai indivisu yang bermanfaat bagi dirinya sendiri dan lingkungannya. Kecakapan personal ini, telah diakomodasi pada karakter warga negara baik yang bersifat privat maupun yang publik.

Kecakapan berpikir rasional, mencakup: (1) kecakapan menggali dan menemukan informasi, (2) kecakapan mengolah informasi dan mengambil keputusan, serta (3) kecakapan memecahkan masalah secara kreatif. Kecakapan ini telah diakomodasi pada ketrampilan intelektual kewarganegaraan.

Kecakapan interpersonal mencakup : (1) kecakapan komunikasi dengan empati, (2) kecakapan bekerjasama. Berempati, sikap penuh pengertian dan seni komunikasi dua arah, perlu ditekankan karena berkomunikasi bukan sekedar menyampaikan pesan, tetapi isi dan sampainya pesan disertai dengan kesan baik, dan menumbuhkan hubungan yang harmonis. Kecakapan ini terutama telah terakomodasi dalam aspek berinteraksi dari ketrampilan partisipasi kewarganegaraan.

Kecakapan akademik, yang sering kali juga disebut kemampuan berpikir ilmiah. Kecakapan ini meliputi : (1) identifikasi variabel, (2) merumuskan hipotesis, dan (3) melaksanakan penelitian. Kecakapan ini basisnya ada pada ketrampilan intelektual kewarganegaraan dan partisipasi kewarganegaraan (memantau, dan mempengaruhi kebijakan publik) yang dalam PBK terutama dikembangkan melalui metode inkuiri.

Kecakapan vokasional, seringkali disebut pula dengan ketrampilan kejuruan, artinya ketrampilan yang dikaitkan dengan bidang pekerjaan tertentu yang terdapat di masyarakat. Pada dasarnya melalui pengembangan ketrampilan kewarganegaraan yang meliputi ketrampilan intelektual dan ketrampilan partisipasi dan karakter kewarganegaraan (secara antisipatori) diharapkan akan mewarnai profesi mereka. Misalnya ketika seorang warga negara berprofesi sebagai hakim , maka karakter kewarganegaraannya tetap melekat. Karakter yang dimaksud mislanya jujur, keteguhan hati, toleran terhadap ketidak pastian. Atau ketika memilih profesi sebagai politisi , maka karakter kewarganegaraan seprti : berpikir terbuka, berpikir kritis, berpikir kewarganegaraan (peduli terhadap urusan-urusan publik), keharuan, *civility* tetap melekat pada profesi tersebut.

Dengan memperhatikan keterkaitan *civic knowledge*, *civic skills* dan *civic dispositions* dengan CTL, *life skill* dan portofolio di atas, maka dapat diajukan prinsip – prinsip penerapan dalam praktek pembelajaran sebagai berikut :

PRINSIP PRINSIP PEGEMBANGAN PARADIGMA BARU PKN DALAM PRAKTEK PEMBELAJARAN KBK

- 1) Ketiga komponen PKN (*civic knowledge*, *civic skills* dan *civic dispositions*) secara konseptual dan teoritik dapat dipilah – pilah, tetapi dalam penerapan pada praktek pembelajaran merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan.
- 2) Aspek – aspek *civic skills* seperti telah disebutkan di atas, muncul lebih didasarkan pada tuntutan kebutuhan hidup yang nyata dan mendasar bagi warganegara untuk mengambil peran yang bertanggungjawab dalam kehidupan publik (bermasyarakat, berbangsa dan bernegara) dalam sebuah masyarakat yang demokratis. Oleh karena itu obyek yang menjadi sasaran *civic skills* harus benar – benar persoalan publik riil, substansial dan aktual. Ini berarti obyeknya tidak terkungkung di kelas, tetapi menembus dinding kelas meluncur pada kehidupan politik, pemerintahan dan kemasyarakatan baik level lokal, regional, nasional bahkan mondial/internasional.
- 3) Aspek – aspek karakter kewarganegaraan lebih merupakan dampak dari praktek pembelajaran jangka panjang yang mengembangkan *civic skills* daripada didesain secara eksplisit dan dapat diwujudkan secara langsung (seketika). Hal ini disebabkan pembentukan watak/karakter atau sifat yang melekat (inheren) pada setiap warganegara merupakan proses transformasi yang membutuhkan waktu relatif lama. Oleh karena itu, ketika mengembangkan *civic skills* seharusnya sudah dapat diprediksi dampaknya bagi upaya pembentukan karakter kewarganegaraan.
- 4) Praktek pembelajaran dalam KBK PKN menuntut penerapan CTL, portofolio dan *life skill* , hal itu akan terakomodasi ketika secara konsisten mengembangkan pengetahuan kewarganegaraan, ketrampilan kewarganegaraan dan karakter kewarganegaraan. Misalnya untuk siswa SD dapat dikembangkan, ketrampilan menggambarkan, menganalisa dan berinteraksi. Sedangkan siswa SLTP/SMU bisa ditambah dengan ketrampilan: evaluasi, mengambil posisi baru dan mempertahankan posisi serta ketrampilan memantau dan mempengaruhi. Hanya saja untuk SMU lebih dalam tingkat akademiknya dan luas obyeknya.
- 5) Apabila praktek pembelajaran PKN telah mengaplikasikan *civic knowledge*, *civic skills*, dan *civic dispositions* pada dasarnya dapat dinyatakan telah melaksanakan pembelajaran KBK.
- 6) Praktek pembelajaran KBK PKN dapat dinyatakan bercirikan penyajian konsep dan teori kewarganegaraan yang substansial (intisari) tetapi kaya akan pengalaman (ngelakoni).
- 7) Efektivitas praktek pembelajaran PKN sebagaimana yang dituntut oleh KBK pada akhirnya sangat ditentukan oleh partisipasi subyek didik yang tinggi dan guru yang memiliki otonomi akademik dan kreatif.

Daftar Pustaka

- Budimansyah, Dasim.(2002). *Model Pembelajaran dan Penilaian Portofolio*. Bandung : PT GENESINDO.
- Branson, Margaret S, dkk. (1999). *Belajar Civic Education dari Amerika*. Yogyakarta : Kerjasama LKIS dan The Asia Foundation.
- Broad Based Education.(2001). *Konsep Pendidikan Kecakapan Hidup (Life Skill Education)*. Jakarta : Tim Broad Based Education – Departemen Pendidikan Nasional.
- Center for Civic Education (1994). *National Standards for Civics and Government*. Calabasas : CCE.
- Center for Indonesian Civic Education. (2000). *A Needs Assesment for New Indonesian Civic Education : A National Survey 1999 – 2000*. Bandung : Conducted by CICED in Collaboration with United States Information Agency/Service USIA/USIS.
- Cholisin (2004). PPKn Paradigma Baru dan Pengembangannya dalam KBK, *Jurnal Racmi, Media Informasi, Komunikasi, dan Pengembangan Sumberdaya*, Volume 04 No. 01 Mei. Yogyakarta : Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP).
- Cholisin. (2002). Mengembangkan Paradigma Baru PKN yang Independen dari Kepentingan Politik Rezim, *Jurnal PPKn : Kajian Teori dan Penerapannya*, Th. 15, No.1, Malang : Universitas Negeri Malang,
- Cholisin (2000). Reorientasi dan Rekonstruksi Paradigma Lama Pendidikan Kewarganegaraan Menuju Indonesia Baru, *Jurnal Cakrawala Pendidikan*, Th. XIX, No. 4, Yogyakarta : LPM Universitas Negeri Yogyakarta.
- Departemen Pendidikan Nasional.(2004). *Kurikulum 2004: Standar Kompetensi Mata Pelajaran Kewarganegaraan Sekolah Menengah Pertama dan Madarasah Tsanawiyah*. Jakarta : Departemen Pendidikan Nasional.
- Departemen Pendidikan Nasional.(2004). *Kurikulum 2004: Pedoman Penilaian Kelas*, Jakarta : Departemen Pendidikan Nasional.
- Direktorat Pendidikan Lanjutan Pertama.(2003). *Pendekatan Kontekstual (Cotextual Teaching and Learning/CTL)*. Jakarta : Departemen Pendidikan Nasional - Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah – Direktorat Pendidikan Lanjutan Pertama.
- Djemari Mardapi, dkk. (2000). *Standar Kompetensi Lulusan SD, SLTP, dan SMU – IPS Bahasa Pada Mata Pelajaran IPS dan Bahasa*. Ringkasan Laporan Penelitian. Kerjasama Pusat Pengujian Balitbang Diknas dengan Universitas Negeri Yogyakarta.
- “Pendidikan Sekolah Belum Menyenangkan”, Kompas, 28 Februari 2003, halaman 9.
- “Perlu Digalakkan, Model Kurikulum Berbasis Kehidupan”, Kompas, 24 April 2003, halaman 9.
- Suryadi, Ace dan Somardi.(2000). Pemikiran Ke Arah Rekayasa Kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan. Makalah Seminar tentang “*The Needs for New Indonesian Civic Education*” diselenggarakan CICED, di Bandung 29 Maret 2000.

